

BAB III

AKUNTABILITAS

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik maka diperlukan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung-jawaban atas segala tugas dan kewajiban yang

diamanatkan kepadanya. Pertanggung jawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui suatu media yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Dalam melakukan evaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran LAKIP 2015

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	> 100%	Sangat Berhasil
2.	75 % - 100 %	Berhasil
3.	55 % - 75 %	Cukup Berhasil
4.	< 50%	Kurang Berhasil

3.1. Capaian Kinerja

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran RPJMD Tahun 2015, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2015 dengan realisasinya.

Capaian kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana
dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung
Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Optimalnya penerapan Pengaruh utama Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan	1) Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	14% (6 dari 43 SKPD)	41,86% (18 dari 43 SKPD)	300 %
	2) Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	18,6% (8 dari 43 SKPD)	16,3% (7 dari 43 SKPD = 100 %)	108,11 %
		7 Instansi Vertikal	9 Instansi Vertikal = 128,6%	
	3) Jumlah Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan	31 Lembaga	33 Lembaga	106,45 %
2. Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan	1) Jumlah Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100 %
	2) Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah	6,02 %	28,94 %	480,73 %
	3) Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	6,46 %	31,30 %	484,52 %
3. Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1) Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	4 Kebijakan	3 Kebijakan	75 %
	2) Jumlah Instansi yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	11 Instansi	11 Instansi	100 %
	3) Jumlah Kabupaten Kota yang Membentuk Kota Layak Anak (KLA)	1 Kabupaten	0 Kabupaten	0 %
4. Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas	1) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	11,69 %	11,30 %	103,45 %
	2) Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif	78,74 %	81,78 %	103,86 %
	3) Jumlah Kebijakan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100 %

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya maka diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Berdasarkan capaian kinerja tersebut kemudian dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja ditahun yang akan datang (*performance improvement*).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut diatas, maka dapat dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran strategis RPJMD pada Tahun 2015, sebagai berikut :

Tujuan :

Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	:	Optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan
----------------------------	----------	---

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui Program : **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.**

Adapun pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan	1) Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	14% (6 dari 43 SKPD)	41.86% (18 dari 43 SKPD)	300 %
	2) Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	18,6% (8 dari 43 SKPD)	16,3% (7 dari 43 SKPD = 100 %)	108,11 %
		7 Instansi Vertikal	9 Instansi Vertikal = 128,6%	
	3) Jumlah Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan	31 Lembaga	33 Lembaga	106,45 %
Rata – rata Capaian Sasaran 1				171,52 %

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan terdapat 3 (tiga) indikator yang melebihi target. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 171,52% atau tercapai dengan kualifikasi sangat berhasil.

Dalam rangka mencapai target sasaran strategi 1, setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja pencapaian optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

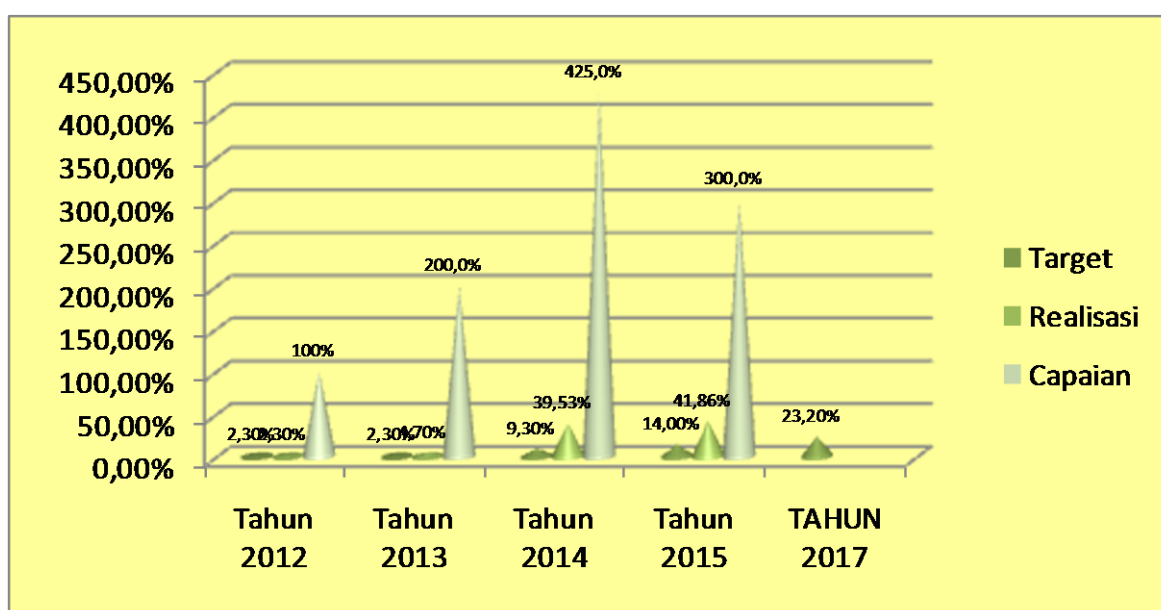
Untuk mengukur pencapaian optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, setidaknya dapat dilihat dari capaian target dari 3 (tiga) indikator.

Indikator Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG tercapai sebesar 41,86% (18 dari 43 SKPD, yaitu BPPKBPA, BPAD, DPP KORPRI, DPPKAD, KESBANGPOL, DINKES, BPMPD, BLHD, BKP, SATPOL PP, INSPEKTORAT, DISPORA, RSUD, BPBD, BKD, DIKLAT, DISPERINDAG dan KUMKM), mengalami peningkatan yang bila dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 39,53%

(17 dari 43 SKPD, yaitu BPPKBPA, Bappeda, DISTANBUNAK, Sekretariat DPP KORPRI, BPAD, DPPKAD, KESBANGPOL, DINKESSOS, DINKES, BPPTPM, BPMPD, BLHD, Biro Perekonomian SETDA, Biro Pembangunan SETDA, Biro Organisasi SETDA, Biro Hukum SETDA dan BKP) dan dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 4,7% (2 dari 43 SKPD).

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG tahun ini sebesar 41,86% (18 dari 43 SKPD) sudah melampaui target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 23,2% (10 dari 43 SKPD), dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1
Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG
Tahun 2012 – 2015



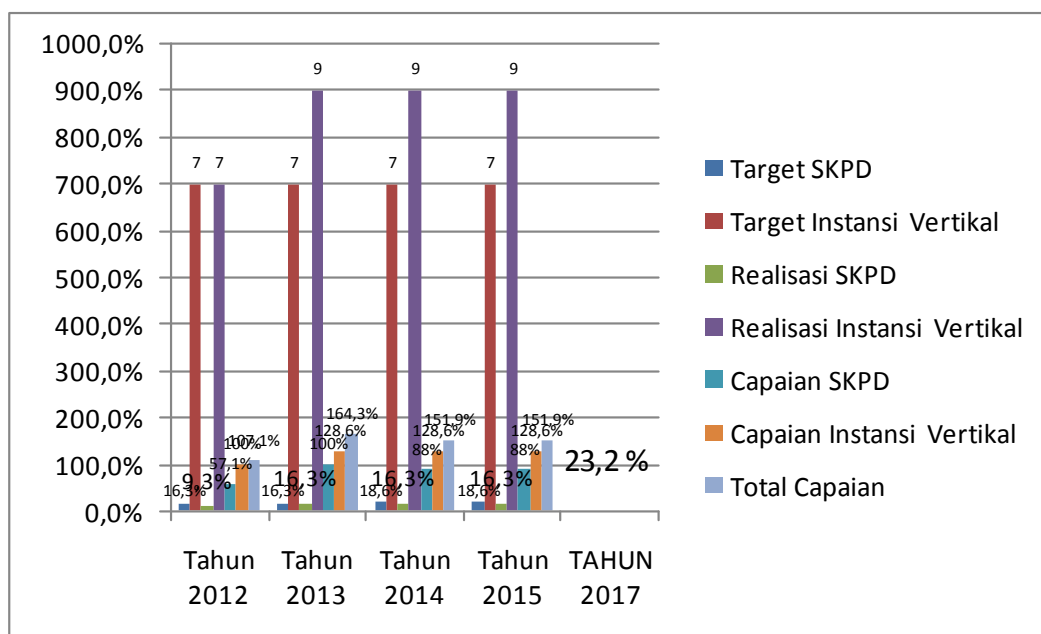
Indikator Persentase SKPD yang memiliki data terpilah pada tahun 2015 menggunakan data terpilah yang terdapat pada buku profil Gender tahun 2014. Indikator Persentase SKPD yang memiliki data terpilah pada tahun 2015 tercapai 16,3% (7 dari 43 SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kesbangpol, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak serta Dinas Koperasi dan

UMKM). Pencapaian sama bila dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 16,3% (7 dari 43 SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kesbangpol, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak serta Dinas Koperasi dan UMKM) karena output yang dihasilkan dari indikator ini adalah sama yaitu Buku Profil Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan target 7 instansi vertical tercapai 128,6% yaitu 9 instansi vertikal (Badan Pusat Statistik, BKKBN, Badan Narkotika Provinsi, Pengadilan Tinggi Agama, Kemenkum dan HAM, Kanwil Kemenag, Polda, Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), hasil ini sama dengan pencapaian pada tahun 2013.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Persentase SKPD yang memiliki data terpilah sampai dengan tahun ini sebesar 16,3% (7 dari 43 SKPD) sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 23,2% (10 dari 43 SKPD), dapat dilihat pada gambar berikut :

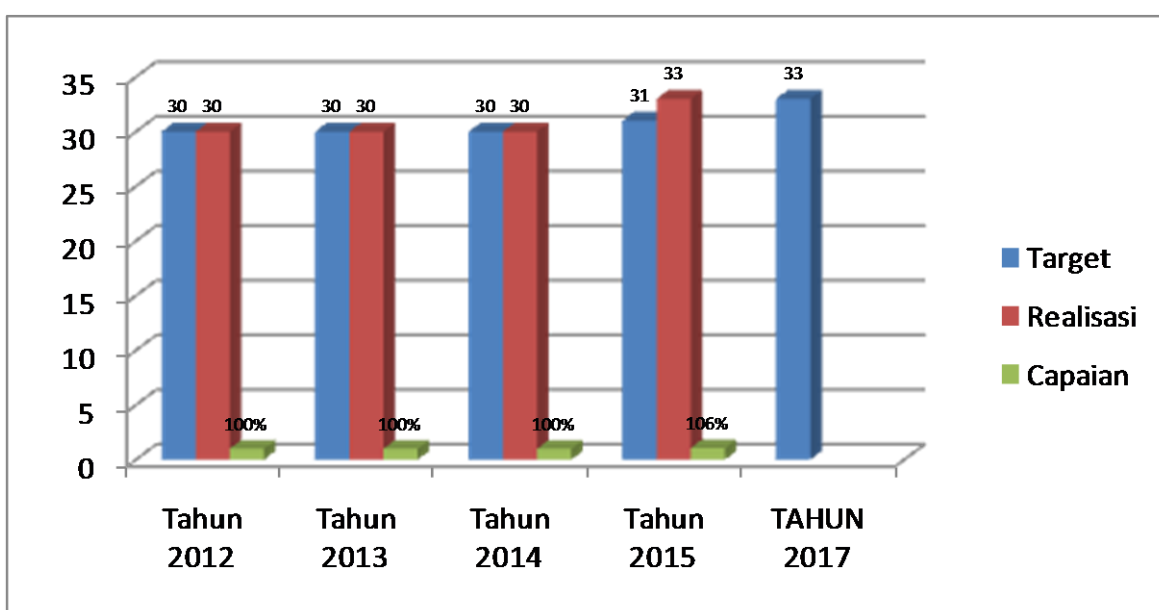
Gambar 3.2
Persentase SKPD yang memiliki data terpilah
Tahun 2012 – 2015



Indikator Jumlah Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan sebanyak 33 lembaga tercapai sebesar 106,45%, pencapaian ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2012, 2013 dan 2014.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Jumlah Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan sebanyak 30 lembaga, sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebanyak 33 lembaga, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.3
Jumlah Lembaga Masyarakat yang berperan dalam
Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2012 – 2015



Dalam rangka optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Capaian kinerja tahun 2012 sebesar 153,6%, tahun 2013 sebesar 156,2%, pada tahun 2014 sebesar 211,03% sedangkan pada tahun 2015 tercapai sebesar 171,52% dikualifikasikan sangat berhasil. Walaupun capaian pada tahun 2015

mengalami penurunan sebesar 39,51% akan tetapi pencapaian pada tahun 2015 masih diatas dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan semakin baiknya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Meskipun pencapaian target sudah masuk dalam kategori sangat berhasil, namun tetap ada hambatan dan kendala yang dihadapi. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis “optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan” antara lain adalah :

1. Masih rendahnya pemahaman mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) serta kurangnya komitmen dalam menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Dalam pelaksanaan rapat koordinasi Pokja PUG, peserta yang seharusnya hadir adalah para pejabat eselon II, namun peserta rapat yang hadir diwakili adalah eselon III, eselon IV dan staf.

2. Belum optimalnya pemanfaatan data terpilah dalam proses perencanaan dan evaluasi.
3. Belum optimalnya peran Organisasi sosial politik, Organisasi keagamaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Advokasi mengenai PUG secara intensif kepada para pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Memperbanyak pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait dan mengoptimalkan peran dan fungsi pokja PUG yang sudah dibentuk.
3. Mendata kembali ke 43 SKPD untuk melihat jumlah keseluruhan SKPD yang sudah memiliki data terpilah gender.
4. Advokasi secara intensif kepada Orsospol, Organisasi keagamaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar berperan secara optimal dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Tujuan :

Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis 2	:	Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan
----------------------------	---	--

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui Program : **Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**.

Adapun pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan	1) Jumlah Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100 %
	2) Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah	6,02 %	28,94 %	480,73 %
	3) Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	6,46 %	31,30 %	484,52 %
Rata – rata Capaian Sasaran 2				355,08 %

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 (satu) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 355,08% atau tercapai dengan kualifikasi sangat berhasil.

Dalam rangka mencapai target sasaran strategi 2, setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja pencapaian Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan. Untuk mengukur pencapaian Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan dan peran serta posisi perempuan, setidaknya dapat dilihat dari capaian target dari 3 (tiga) indikator.

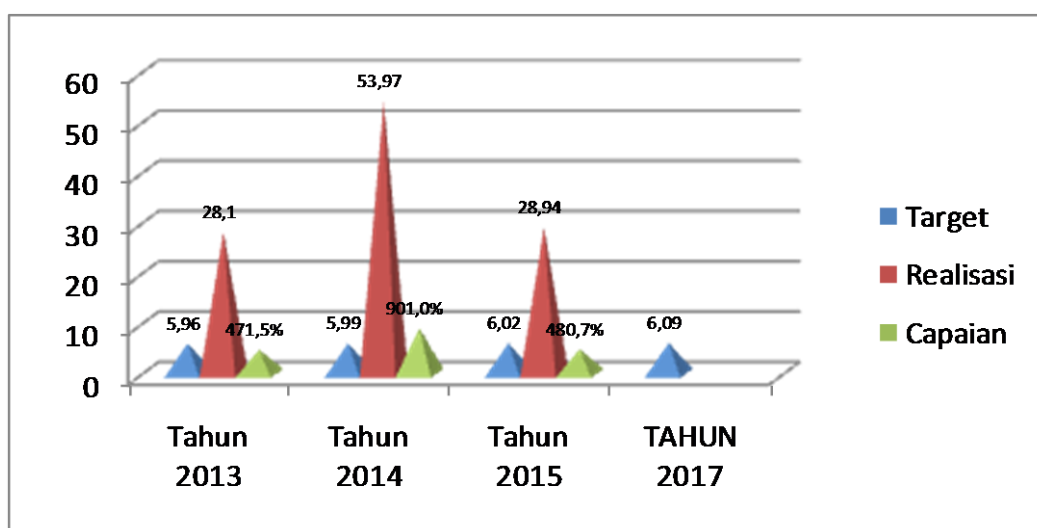
Indikator Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah tercapai sebesar 28,94% dari target 6,02% dengan rumusan :

- Rekapitulasi data dari Kab/Kota dengan rumusan : $\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah} \div \text{Jumlah pekerja perempuan} (15.935 / 55.048 * 100 = 28,94\%)$

Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan persentase perempuan di lembaga pemerintah. Pencapaian ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 28,10% walaupun ada penurunan capaian pada tahun 2014 yaitu sebesar 53,97% akan tetapi pencapaian pada tahun 2015 ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 28,94%.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah sampai dengan tahun ini sebesar 28,94% sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 6,09%, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.4
Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2013 – 2015



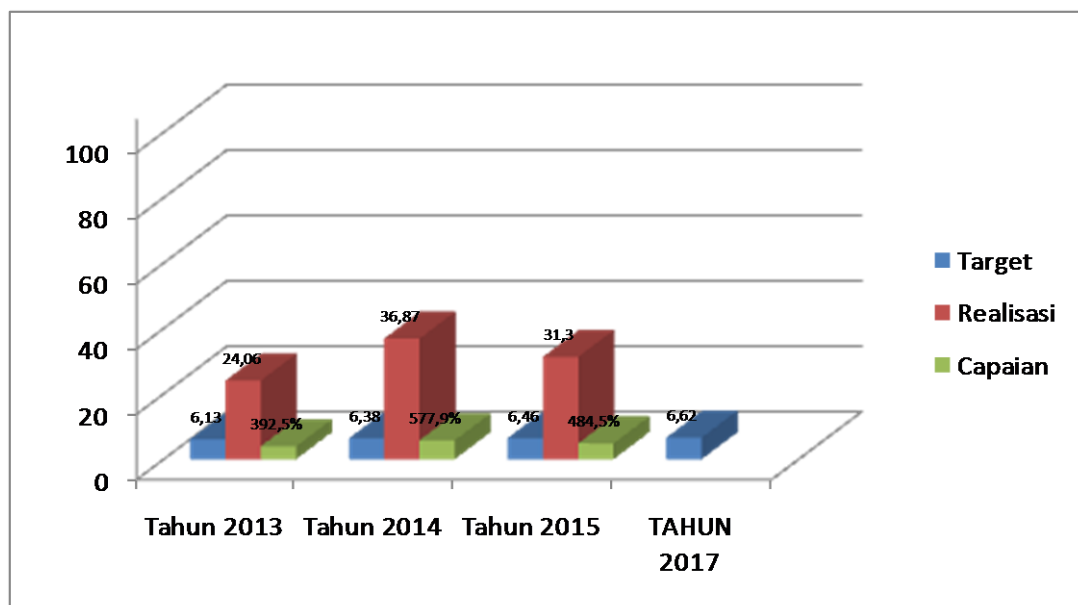
Indikator Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tercapai sebesar 31,30% dari target 6,46% dengan rumusan :

- Data dari Kab/Kota dengan rumusan : Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan Jumlah angkatan kerja perempuan.
- Rekapitulasi Data Provinsi dengan rumusan : jumlah capaian kinerja kab/kota dibagi dengan jumlah kab/kota ($219,10 / 7 = 31,30\%$).

Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Pencapaian ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 24,06% walaupun masih dibawah capaian tahun 2014 sebesar 36,87%.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah sampai dengan tahun ini sebesar 31,30% sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 6,62%, dapat dilihat pada gambar berikut :

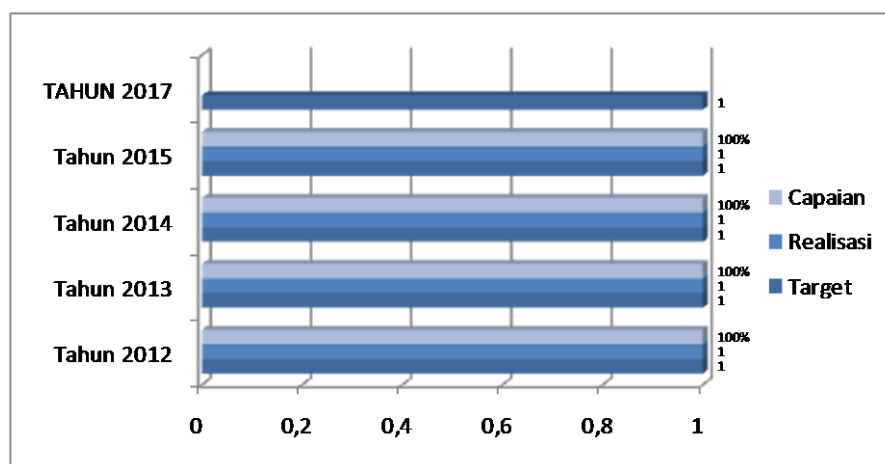
Gambar 3.5
Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Tahun 2013 – 2015



Indikator Jumlah Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan tercapai 100%, yaitu 1 (satu) kebijakan yaitu Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu (PHI) yang ke – 87 Tahun 2015 dengan menghasilkan pemenang-pemenang dari beberapa kategori yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/223/BPPKBPA/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pengukuhan Pemenang Perlombaan Pelaksana/Pengelola Terbaik Program Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia di Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2015, serta Peringatan Hari Ibu (PHI) yang ke – 87 Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1110.L/BPPKBPA/2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2015. pencapaian ini tetap bila dibandingkan tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Jumlah Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan sebanyak 1 Kebijakan, sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebanyak 1 Kebijakan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.6
Jumlah Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
dan Peran Serta Posisi Perempuan
Tahun 2012 – 2015



Dalam rangka Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan dari tahun ke tahun, capaian kinerja tahun 2015 sebesar 100% dikualifikasikan berhasil. Artinya pencapaian pada tahun 2015 tetap bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014.

Meskipun pencapaian target sudah masuk dalam kategori berhasil, namun tetap ada hambatan dan kendala yang dihadapi. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis “Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan” antara lain adalah :

1. Kurang tersedianya data yang siap pakai guna mendukung capaian sasaran strategis “Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan”.
2. Kegiatan yang mendukung indikator Jumlah Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan masih terbatas pada kegiatan yang bersifat nasional yaitu peringatan hari ibu.

Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Melakukan pendataan terkait peran perempuan, kelompok ekonomi produktif perempuan, dan lainnya guna mencapai sasaran strategis “Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan”.
2. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi perempuan, organisasi sekolah, organisasi profesi, dan Institusi media massa dalam mencapai Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan.

Tujuan :

Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis 3	:	Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
----------------------------	---	--

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui Program : **Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Adapun pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1) Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	4 Kebijakan	3 Kebijakan	75 %
	2) Jumlah Instansi yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	11 Instansi	11 Instansi	100 %
	3) Jumlah Kabupaten Kota yang Membentuk Kota Layak Anak (KLA)	1 Kabupaten	0 Kabupaten	0 %
Rata – rata Capaian Sasaran 3				58,33 %

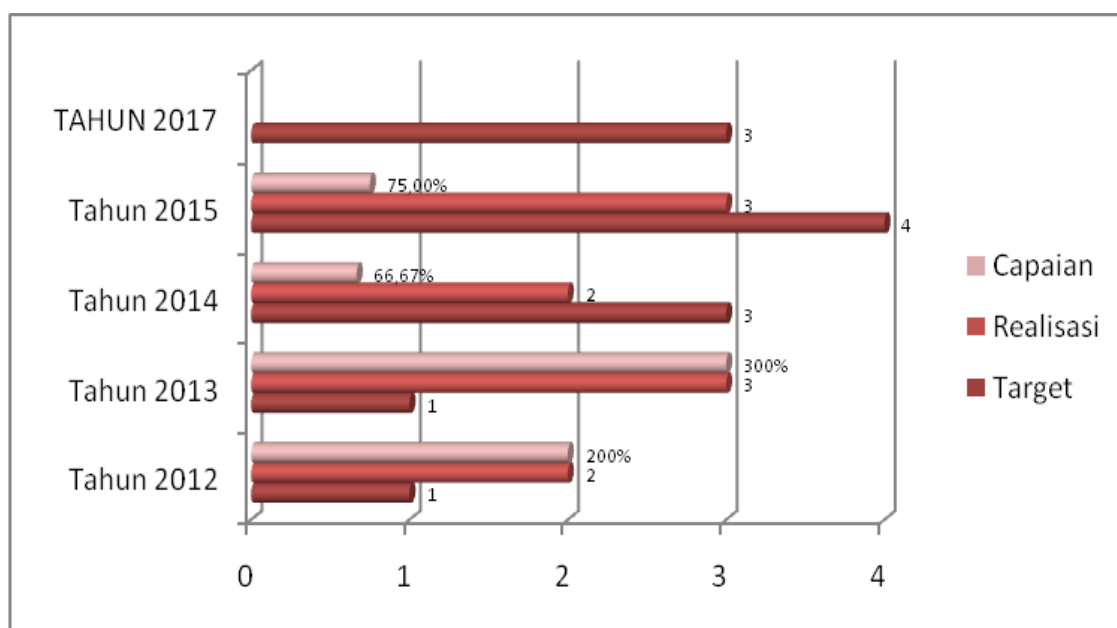
Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja, 1 (satu) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sedangkan 2 (dua) indikator kinerja masih belum tercapai yaitu Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak hanya tercapai 2 kebijakan dari 4 kebijakan yang ditargetkan dan indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA) dari 1 kabupaten/kota yang ditargetkan tidak ada kabupaten/kota yang mendeklarasikan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 50%.

Dalam rangka mencapai target sasaran strategi 3, setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja pencapaian Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mengukur pencapaian Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, setidaknya dapat dilihat dari capaian target dari 3 (tiga) indikator. Indikator Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak tercapai 3 kebijakan dari target 4 kebijakan (58,33%) yaitu Perjanjian Kerjasama dengan Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Wilayah Sumatera dengan membentuk suatu forum yang diberi nama Forum Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (FP3A) yang salah satu fungsinya adalah sebagai Perkuatan kerjasama dan langkah langkah pencegahan, pemberantasan serta perlindungan dan penanganan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak lalu Penyusunan Kajian Akademik terkait Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Laporan Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Capaian ini sama bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 3 kebijakan yaitu : Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman pengarusutamaan hak anak, Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 54 Tahun 2013 tentang Gugus tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Perjanjian kerjasama antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi se-wilayah Sumatera tentang Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang. Pencapaian ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu 2 kebijakan : MoU tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, dan Kerjasama penanganan dan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking dengan Kepolisian Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian tahun 2015 masih lebih rendah daripada capaian tahun 2014, dapat dilihat pada gambar berikut :

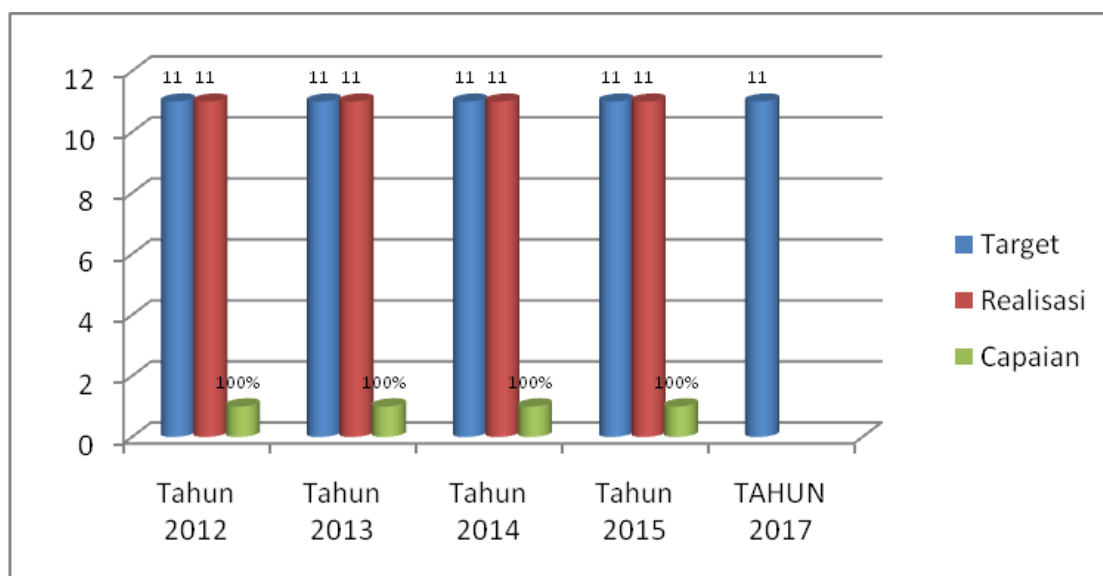
Gambar 3.7
Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
Tahun 2012 – 2015



Indikator Jumlah Instansi yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan tercapai sebanyak 11 instansi (100%) yaitu : Dinsos, Dinkes, Kepolisian, Depag, LSM, Organisasi profesi, PKK, Kejaksaan, Pengadilan, Advocate). Pencapaian ini tetap bila dibandingkan tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Jumlah Instansi yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan tercapai sebanyak 11 Instansi yaitu : Dinsos, Dinkes, Kepolisian, Depag, LSM, Organisasi profesi, PKK, Kejaksaan, Pengadilan, Advocate) dan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebanyak 11 Instansi yaitu : Dinsos, Dinkes, Kepolisian, Depag, LSM, Organisasi profesi, PKK, Kejaksaan, Pengadilan, Advocate), dapat dilihat pada gambar berikut :

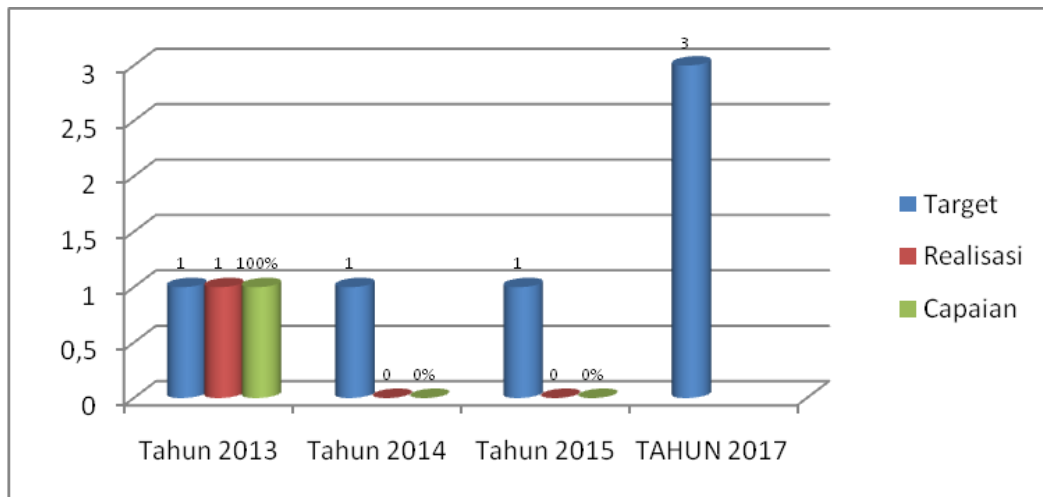
Gambar 3.8
Jumlah Instansi yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan
Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
Tahun 2012 – 2015



Indikator Jumlah Kabupaten Kota yang Membentuk Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2015 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 1 Kabupaten/Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA). Pencapaian ini menurun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu kabupaten Bangka Tengah mendeklarasikan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Jumlah Kabupaten Kota yang Membentuk Kota Layak Anak (KLA) baru tercapai sebanyak 1 Kabupaten yaitu : Kabupaten Bangka Tengah dan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebanyak 3 Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.9
Jumlah Kabupaten/Kota yang Membentuk
Kota Layak Anak (KLA)
Tahun 2013 – 2015



Dalam rangka Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun meningkat. Capaian kinerja tahun 2015 sebesar 58,33% dikualifikasikan belum mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian tahun 2015 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014 sebesar 100% dan capaian tahun 2013 sebesar 200%.

Pencapaian indikator kinerja yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut dikarenakan adanya hambatan dan kendala yang dihadapi. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis “Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak” antara lain adalah :

1. Kebijakan yang dihasilkan baru sebatas MoU, Peraturan Gubernur, dan Kajian Akademik, seharusnya kebijakan yang dihasilkan dapat berupa Peraturan Daerah (Perda) agar adanya payung hukum dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Belum optimalnya peranan instansi yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

3. Belum optimalnya peran P2TP2A sebagai ujung tombak yang masih berfokus kepada pusat layanan, belum berperan sebagai pusat informasi dan pemberdayaan.
4. Belum optimalnya kebijakan Kabupaten/Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA).

Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Advokasi kepada legislative agar mendapat dukungan dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Menyusun Standar Pelayanan (SP) tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pembagian tugas yang jelas pada instansi yang terlibat.
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait agar penerapan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dapat berjalan optimal.
4. Peningkatan kapasitas P2TP2A sebagai pusat layanan, pusat informasi dan pemberdayaan.
5. Optimalisasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tujuan :

Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana, dengan 1 (satu) sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis 4	:	Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas.
----------------------------	----------	--

Untuk mencapai target kinerja atas sasaran ini dilaksanakan melalui Program : **Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.**

Adapun pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas	1) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	11,69 %	11,30 %	103,45 %
	2) Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif	78,74 %	81,78 %	103,86 %
	3) Jumlah Kebijakan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100 %
Rata – rata Capaian Sasaran 4				102,43 %

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 4 sebesar 102,43% atau tercapai dengan kualifikasi sangat berhasil.

Dalam rangka mencapai target sasaran strategi 4, setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja pencapaian Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas. Untuk mengukur pencapaian Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas, setidaknya dapat dilihat dari capaian target dari 3 (tiga) indikator.

Indikator Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tercapai sebesar 11,30% dari target 11,69% dengan rumusan :

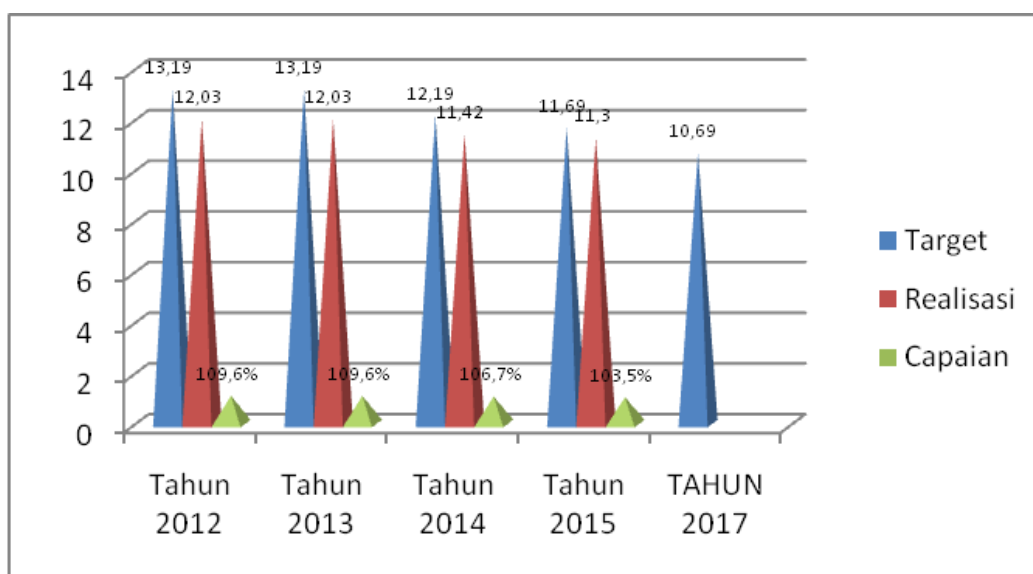
- Data dari Kab/Kota dengan rumusan : jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dibagi dengan jumlah keluarga.
- Rekapitulasi Data Provinsi dengan rumusan : jumlah capaian kinerja kab/kota dibagi dengan jumlah kab/kota ($79,12 / 7 = 11,30\%$).

Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi persentase Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Pencapaian ini meningkat bila dibandingkan tahun 2012 (12,03%), tahun 2013 (12,03%) dan tahun 2014 (11,42%).

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja

Indikator Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sampai dengan tahun ini sebesar 11,30% sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 10,69%, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.10
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
Tahun 2012 – 2015



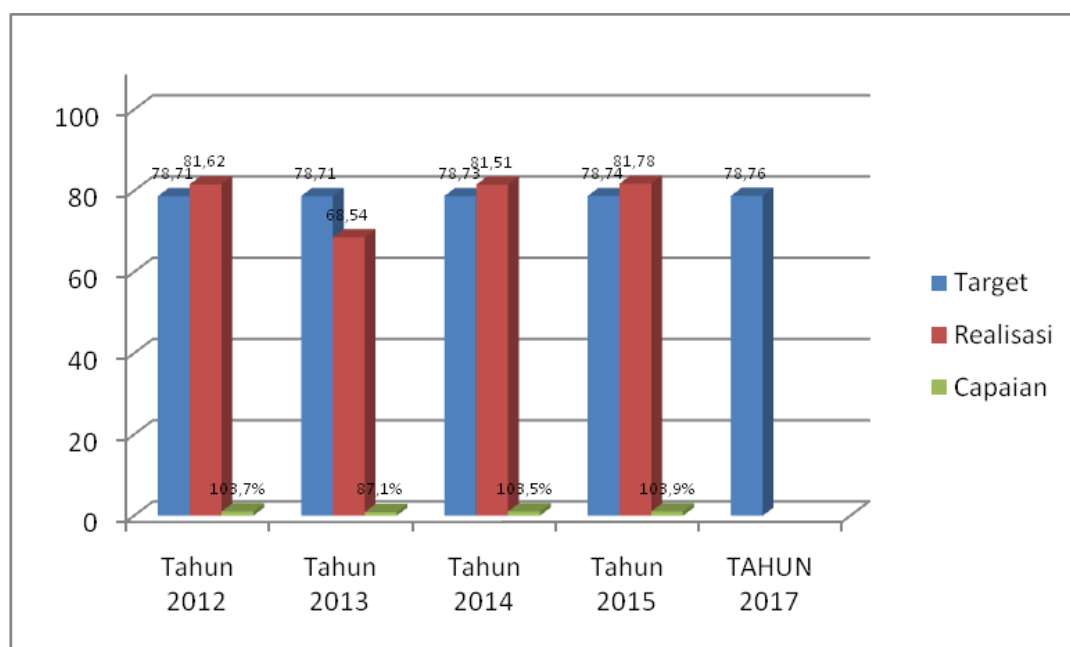
Indikator Tingkat prevalensi peserta KB aktif tercapai sebesar 81,78% dari target yang ditetapkan sebesar 78,74% dengan rumusan :

- Data dari Kab/Kota dengan rumusan : jumlah peserta program KB aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS)
- Rekapitulasi Data Provinsi dengan rumusan : jumlah capaian kinerja kab/kota dibagi dengan jumlah kab/kota ($572,49 / 7 = 81,78\%$)

Pencapaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2012 (81,62%) akan tetapi mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2013 (68,54%) dan masih terus meningkat bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 (81,51%). Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang dilakukan kepada masyarakat serta adanya sosialisasi pembangunan berwawasan kependudukan (PK) dinilai dapat meningkatkan capaian tersebut.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis, capaian kinerja Indikator Tingkat prevalensi peserta KB aktif sampai dengan tahun ini sebesar 81,78% sedangkan target pada jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis yaitu sebesar 78,76%, ini dapat diartikan bahwa capaian kinerja Indikator Tingkat prevalensi peserta KB aktif sudah melampaui dari target tahun terakhir Rencana Strategis, dapat dilihat pada gambar berikut :

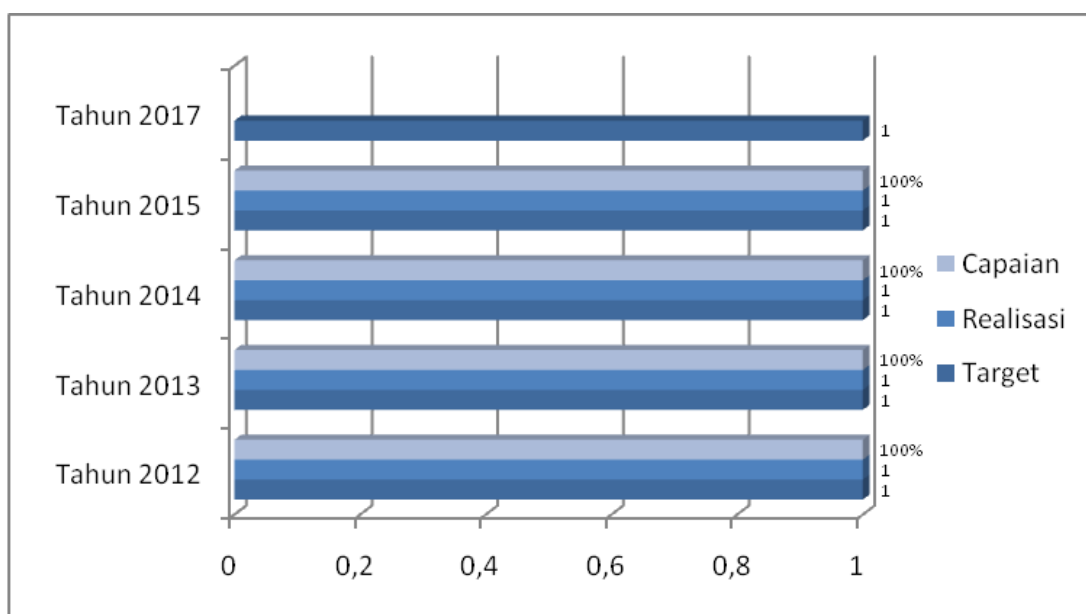
Gambar 3.11
Tingkat prevalensi peserta KB aktif
Tahun 2012 – 2015



Indikator Jumlah Kebijakan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga tercapai 100% sebanyak 1 (satu) kebijakan yaitu Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional yang ke – 22 Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/154.U/BPPKBPA/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan dalam rangka memperingati hari keluarga ke – 22 Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2015 dengan menghasilkan pemenang-pemenang dari beberapa kategori yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :

188.44/411/BPPKBPA/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Pengukuhan Pemenang Perlombaan dalam rangka hari keluarga ke – 22 Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2014. Pencapaian ini tetap bila dibandingkan tahun 2013 dan tahun 2014 (100%), dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.12
Jumlah Kebijakan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga
Tahun 2012 – 2015



Dalam rangka Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Capaian kinerja tahun 2015 sebesar 102,43 dapat dikualifikasikan sangat berhasil meskipun capaian tahun 2015 masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 103,42%.

Meskipun pencapaian target sudah masuk dalam kategori berhasil, namun tetap ada hambatan dan kendala yang dihadapi. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis “Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas” antara lain adalah :

1. Penyediaan alat kontrasepsi dari BKKBN Pusat tidak sesuai dengan minat masyarakat, misalnya Pil KB yang disediakan : Kimia Farma, Noride, Exultion, sedangkan masyarakat menginginkan merk Andalan.

2. Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antara BPPKBPA dengan BKKBN.

Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Usulan kegiatan tahun berikutnya (Tahun 2016) agar lebih prioritas dalam mencapai sasaran berupa kegiatan fasilitasi penyusunan dan harmonisasi kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga yang meliputi : sosialisasi, advokasi, rapat koordinasi, dan pembinaan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan menyediakan alat kontrasepsi sesuai minat masyarakat dan meningkatkan pelayanan KB gratis bagi masyarakat.

3.3. Realisasi Anggaran

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014

Pada Tahun Anggaran 2014 dialokasikan sebanyak Rp. 7.883.729.887,- dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 7.278.006.613,- atau 92,32% dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung dianggarkan Rp. 3.617.990.887,-. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai. Dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 3.324.016.710,- atau 91,87%.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung dianggarkan Rp. 4.265.739.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 3.953.989.903,- atau 92,69%.

2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015

Pada Tahun Anggaran 2015 dialokasikan sebanyak Rp. 10.035.469.116,- dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 9.028.675.447,- atau 89,97% dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung dianggarkan Rp. 4.342.539.716,-. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai. Dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 3.768.815.475,- atau 86,79%.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung dianggarkan Rp. 5.692.929.400,-. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 5.259.859.972,- atau 92,39%.

3. Analisis Keuangan dengan Pencapaian Kinerja

Dilihat dari realisasi anggaran, dialokasikan anggaran sebanyak Rp. 10.035.469.116,- dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak Rp. 9.028.675.447,- atau 89,97% yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebanyak Rp. 4.342.539.716,- terealisasi sebanyak Rp. 3.768.815.475,- atau 86,79%. Kemudian Belanja langsung dianggarkan Rp. 5.692.929.400,- terealisasi sebanyak Rp. 5.259.859.972,- atau 92,39%. Hal ini berarti bahwa dilihat dari sisi kinerja dan anggaran, capaian kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas (98,81%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan (89,19%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relative baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran
Tahun 2015

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat		673,168,800.00	619,207,800.00	91,98%
		Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	102,254,800.00	101,202,000.00	98,97%
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	123,588,400.00	123,588,400.00	100%
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66,321,200.00	66,041,700.00	99,58%
		Penyusunan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG)	251,987,200.00	225,340,900.00	89,42%
		Advokasi dan Pelatihan PPRG provinsi kepulauan bangka belitung	85,566,400.00	60,959,600.00	71,24%
		Advokasi dan fasilitasi program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	43,450,800.00	42,075,200.00	96,83%
Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		1,373,363,400.00	1,224,970,300.00	89,19%
		Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan NAPZA	40,062,800.00	37,650,800.00	93,98%
		Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	315,657,800.00	235,919,300.00	74,74%

		Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	147,408,800.00	144,816,100.00	98,24%
		Pembinaan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	217,528,800.00	186,198,000.00	85,6%
		Pembinaan dan pengembangan model desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)	223,137,000.00	202,617,000.00	90,80%
		Operasional kegiatan Dharma Wanita Persatuan Prov. Kep. Bangka Belitung	330,000,000.00	328,600,000.00	99,57%
		Peningkatan Peran dan Fungsi Dewan dalam Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	41,467,800.00	38,735,800.00	93,41%
		Pelaksanaan Fasilitasi yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	58,100,400.00	50,433,300.00	86,80%
Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak		1,144,057,800.00	1,109,610,050.00	96,99%
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	213,964,800.00	198,729,750.00	92,88%
		Penyusunan Profil Kesejahteraan Perlindungan Anak	85,255,400.00	85,255,400.00	100%
		Pembinaan Partisipasi Hak Anak	216,142,000.00	216,142,000.00	100%
		Sosialisasi Pedoman Perlindungan Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum	70,532,000.00	69,743,900.00	98,88%
		Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak dalam Rangka Perlindungan Anak	68,187,000.00	68,187,000.00	100%

		Workshop dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak	72,553,200.00	71,736,100.00	98,87%
		Penyusunan Kajian Akademik terhadap Perlindungan Anak	148,255,600.00	136,255,600.00	91,90%
		Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Perlindungan Anak	269,167,800.00	263,560,300.00	97,92%
Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas	Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga		759,945,000.00	750,878,135.00	98,81%
		Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida)	280,262,800.00	280,260,178.00	99,99%
		Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga (HARGANAS)	331,115,000.00	323,030,257.00	97,56%
		Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PK)	148,567,200.00	147,587,700.00	99,34%
TOTAL			3,950,535,000.00	3,704,666,285.00	93,78%